

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2 0 1 8

SUBBAGIAN HUMAS



Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Suara Merdeka	Jateng Pos	Jawa Pos	Media Indonesia	Wawasan
Tribun Jateng	Republika	Kompas	Solo Pos	Media Online

Wilayah Berita: BPK

## Sri Mulyani: Laporan Keuangan WTP Harus Korelasi dengan Pembangunan

<https://economy.okezone.com/read/2018/09/20/20/1953144/sri-mulyani-laporan-keuangan-wtp-harus-korelasi-dengan-pembangunan>

**JAKARTA** - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan, laporan keuangan yang mendapat opini Wajar Tanpa Pengeceualian (WTP) dari audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) bukanlah tujuan akhir bagi kementerian atau lembaga (K/L) dan pemerintah daerah (pemda). Dia menekankan, harus ada korelasi antara opini WTP dengan kinerja pembangunan, khususnya di daerah.

"Karena pada akhirnya, keuangan negara termasuk transfer ke daerah dan keuangan di pemda itu instrumen untuk mencapai tujuan pembangunan dalam menyejahterakan rakyat, mengurangi kemiskinan, memperbaiki kualitas SDM, mengurangi pengangguran dan kesenjangan," ujarnya dalam sambutan membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2018, Gedung Kemenkeu, Jakarta, Kamis (20/9/2018).

Saat ini, lanjutnya, hanya terdapat 8 provinsi yang mendapatkan WTP oleh BPK selama 5 tahun berturut-turut, sejak 2013-2017. Kedelapannya yakni DI Yogyakarta, Gorontalo, Jawa Barat, Kalimantan Selatan, Kepulauan Riau, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Tenggara, dan Sumatera Barat.

Di mana kinerja pembangunan daerah-daerah tersebut terhitung baik bahkan melampaui rata-rata pembangunan nasional. Dari segi pertumbuhan ekonomi rata-rata selama 5 tahun 8 provinsi tersebut tercatat sebesar 5,9%, sedangkan rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional 5,7%.

"Kemudian rata-rata tingkat penganggurannya 5,28%, lebih rendah dari rata-rata nasional yang 5,88%," katanya.

Sementara dari rata-rata indeks pembangunan manusia di 8 provinsi itu 69,86, atau lebih tinggi dari rata-rata nasional yang sebesar 69,55. Lalu dari sisi gini rasio sebesar 0,402, lebih kecil dari rata-rata nasional yang 0,418.

"Saya menyambut gembira indikator WTP yang kita harapkan jadi indikator pengelolaan. Di mana seharusnya memang memiliki korelasi dengan tujuan akhir yang ingin kita capai," jelasnya.

Menurutnya banyak K/L dan pemda berlomba-lomba untuk mendapatkan opini WTP, seolah-olah menjadi tujuan akhir dari pengelolaan anggaran. Padahal perlu diteliti apakah anggaran yang dikelola memang sudah mencapai indikator pembangunan.

"WTP itu merupakan bagian dari garis awal. Kalau kita punya WTP, kita bisa makin melihat dan menggunakan keuangan negara juga di daerah untuk teliti apakah benar-benar memperbaiki indikator pembangunan secara nyata," tekannya.

Sekedar informasi, dalam acara tersebut Sri Mulyani memberikan penghargaan bagi K/L dan pemda yang sejak 2013-2017 mendapatkan opini WTP dari BPK. Di mana sebanyak 65 K/L dan pemda yang mendapatkan penghargaan, termasuk di antaranya kedelapan provinsi tersebut.